

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Penutupan Uji Kir Merugikan

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung Barat

Sumber / Hal : Galamedia / Hal.7

Edisi : Jumat, 3 Agustus 2018

## Penutupan Uji Kir Merugikan

### ■ Pither, "Kebijakan Tidak Pro Rakyat"

#### PADALARANG, (GM).-

Kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menutup tempat pelayanan uji kir dianggap merugikan masyarakat transportasi. Sebab, tidak memperhitungkan dampak ekonomi maupun keselamatan berlalu lintas.

"Maksudnya baik, tapi pelaksanaannya malah menimbulkan persoalan baru. Di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saja ada 80 sampai 100 kendaraan per harinya yang melakukan uji kir, tidak bisa dibayangkan kalau pelayanannya dialihkan ke Bogor. Bakal terjadi penumpukan yang luar biasa, karena daerah yang senasib dengan KBB itu banyak. Tidak menutup kemungkinan, yang mestinya hari itu uji kir karena mengantre bisa enggak jadi. Risikonya terjadi kerawanan kecelakaan lalu lintas karena banyak kendaraan yang tidak laik jalan," kata Sekretaris Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys di Padalarang, Kamis (2/8).

Ia menilai kebijakan yang diambil Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu tidak pro rakyat. Oleh karena itu, politisi dari Partai Demokrat itu meminta Kemenhub untuk meninjau ulang kebijakan tersebut

Ia khawatir kejadian ini membuat pemilik kendaraan menjadi malas untuk uji kir sehingga bisa mengancam keselamatan berlalu lintas. Bahkan, bagi Pemkab Bandung Barat bakal kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) karena layanan uji kir hanya bisa dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Bogor. "Padahal pemilik kendaraannya warga KBB, sementara PAD-nya malah masuk daerah lain," keluhnya.

#### Perhatian serius

Menurut Pither, carut marutnya tempat layanan kir di daerah mesti mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Tidak boleh tinggal diam, tapi menggulirkan bantuan baik untuk penyediaan peralatan kir maupun fisik bangunannya.

"Pemerintah pusat jangan hanya bisa memberikan penilaian lulus dan tidak lulus akreditasi terhadap tempat layanan uji kir. Mestinya memberikan bimbingan teknis juga anggaran," tandasnya

Salah seorang pemilik truk, Agus Supriyadi (51) menyarankan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk memperhatikan kelayakan tempat uji kir. Contohnya di KBB, tempat uji kir dan bangunan milik UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor KBB jauh dari kesan layak.

"Wajar jika KBB tak lulus akreditasi. Seharusnya, ini menjadi perhatian dari pusat yang mengeluarkan kebijakan tersebut juga daerah untuk memperbaiki fasilitas uji kir-nya. Sebab kalau sudah layanan uji kir tutup yang paling banyak dirugikan adalah pemilik kendaraan. Tadinya mau taat aturan dengan melakukan pengujian berkala, tapi kalau uji kir harus ke Bogor agak malas juga," keluh Agus.

Diberitakan sebelumnya, tahun ini KBB melaksanakan pembangunan Gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Cikamuning. Pembangunannya dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 14 miliar.

"Gedungnya berdiri di atas lahan seluas 9.750 meter persegi. Saat ini sedang dilaksanakan pematangan lahan atau cut and fill. Targetnya 22 Desember 2018 sudah harus beres," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KBB Ade Komarudin.

Diakuinya, PAD dari uji kir menjadi yang terbesar di Dishub KBB. Tahun ini ditargetkan sebesar Rp 1,25 miliar dan sampai akhir Juli sudah tercapai 74 persen.

"Setiap tahun PAD dari uji kir selalu melampaui target. Sebenarnya tahun ini pun memiliki peluang untuk melebihi target, namun karena sudah tutup dipastikan tidak akan mampu mencapai target," tambahnya. (B.104)\*\*